



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN DPR RI TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Kami dapat menyelesaikan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020. Buku laporan ini disusun sebagai perwujudan dari akuntabilitas kelembagaan Pusat Kajian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Hal utama yang ingin disampaikan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah bagaimana Pusat Kajian Anggaran melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan (khusus bidang anggaran kepada DPR RI) agar dapat memperkuat kelembagaan Badan Keahlian DPR RI sebagai organisasi pemberi dukungan keahlian.

Laporan Tahunan Pusat Kajian Anggaran 2020 yang telah disusun menggambarkan realisasi pencapaian kinerja anggaran dan pengelolaan sumber daya organisasi selama tahun anggaran 2020. Laporan Tahunan juga memaparkan berbagai permasalahan dan tantangan sekaligus rekomendasi untuk perbaikan tata kelola Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI di masa mendatang khususnya Tahun anggaran 2021.

Jakarta, Januari 2021
Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
EXECUTIVE SUMMARY	5
BAB I : PENDAHULUAN	7
A. Gambaran Umum Organisasi	7
B. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	9
D. Permasalahan yang dihadapi	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. Ringkasan/ikhtisar Renstra Organisasi dan Perencanaan Kerja	14
B. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV : PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Struktur Pusat Kajian Anggaran	10
Tabel 2.	Perbandingan Anggaran dan Pegawai	12
Tabel 3.	Target Kinerja	15
Tabel 4.	Perencanaan Kerja Output Pusat Kajian Anggaran 2020	16
Tabel 5.	SOP	17
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020	18
Tabel 7.	Buletin Tahun 2020	19
Tabel 8.	Analisis Tahun 2020	21
Tabel 9.	Buku Tahun 2020	22
Tabel 10.	Referensi Tahun 2020	22
Tabel 11.	Jurnal Tahun 2020	23
Tabel 12.	Laporan Pengumpulan Data Tahun 2020	24
Tabel 13.	Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2020	24
Tabel 14.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 15.	Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan Realisasi 2020	27
Tabel 16.	Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja 2020	28
Tabel 17.	Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2019 dan 2020	29
Tabel 18.	Sasaran/kegiatan dan Realisasi	29

EXECUTIVE SUMMARY

A. Pusat Kajian Anggaran memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya tata Kelola dukungan kajian anggaran yang baik;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk politik anggaran Dewan;
- c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan;
- d. Terwujudnya kelembagaan Pusat Kajian Anggaran dalam pembinaan jabatan fungsional Analis APBN yang professional.

B. Berdasarkan tujuan di atas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik.
Pusat Kajian Anggaran sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan diharuskan menjalankan reformasi birokrasi. Agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan bagian dari Road Map Reformasi Birokrasi Badan Keahlian DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya.
- b. Penyediaan produk Kajian APBN yang berkualitas dan tepat waktu.
Keberadaan Pusat Kajian Anggaran dibentuk untuk memberikan dukungan keahlian kepada fungsi anggaran DPR RI. Untuk itu produk dukungan fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk penyediaan analisis APBN yang tetap waktu.
- c. Penyediaan produk karya ilmiah APBN sebagai rujukan
Produk karya ilmiah APBN yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran kedepan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran.
- d. Peningkatan profesionalitas Analis APBN
Analis APBN dalam menjalankan tugas dituntut mempunyai sikap yang profesional, untuk meningkatkan profesionalitas tersebut maka Pusat Kajian Anggaran perlu meningkatkan kemampuan Analis salah satunya dengan melakukan kegiatan diklat-diklat yang bersifat tematik sesuai

dengan bidang kepakaran fungsional, agar mampu meningkatkan dukungan keahlian kepada DPR RI.

C. Kendala/hambatan yang dihadapi dan langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain:

a. Ketatalaksanaan

Dalam kondisi pandemi Covid-19, tata kerja di Pusat Kajian Anggaran mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/08572/SETJEN dan BK DPR RI/DA/07/2020 tentang Tata Kerja dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 Tahun 2020, Anggaran Pusat Kajian Anggaran mengalami pengurangan sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 mengenai postur dan rincian APBN Tahun 2020. Untuk mengatasi keadaan tersebut Pusat Kajian Anggaran melakukan revisi anggaran berupa penyesuaian kegiatan.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Analis APBN Pusat Kajian Anggaran yang ideal sesuai dengan Analisa Beban Kerja adalah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang, sedangkan jumlah existing yang ada saat ini 38 (tiga puluh delapan) Analis APBN, untuk mengatasinya Pusat Kajian Anggaran merekrut Analis APBN PPNASN. Jumlah tersebut diuraikan sebagai berikut Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan Analis APBN PPNASN 16 (enam belas) orang, agar kinerja Pusat Kajian Anggaran lebih optimal seharusnya Analis APBN seluruhnya diisi oleh Analis APBN.

c. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan output yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain komputer, laptop dan tinta printer berwarna, termasuk di dalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran merupakan pengembangan dari tugas dan fungsi dari Bagian Analisa APBN pada Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005, Sekretaris Jenderal DPR RI telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 03/PER-SEKJEN/2013, dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa Setjen DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Dalam melaksanakan tugasnya Sekjen dibantu oleh Wakil Sekjen (Pasal 1 ayat 3). Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa Setjen DPR RI terdiri dari 4 deputi, dan salah satu Deputi yaitu Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN dibawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN di dalam melaksanakan anggaran mempunyai dua Satker yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen. Disamping itu Biro juga mempunyai 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR yang dikelola oleh Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara serta Bagian Analisa Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD dan Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI yang dikelola oleh Sekretariat Badan Anggaran.

Pelayanan dukungan keahlian fungsi anggaran selama kurun waktu 2010-2015 melalui peran dari Biro Analisa APBN Setjen DPR RI yaitu membuat analisis dan referensi dalam setiap pembahasan Siklus APBN, yang mencakup Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pembahasan RAPBN dan Nota Keuangannya, Pembahasan Laporan Semester I APBN dan Prognosis 6 bulan berikutnya, Pembahasan RUU Perubahan APBN, Pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN, serta analisis dan referensi berdasarkan tematik APBN.

Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Pasal 413 Ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan Badan Keahlian DPR RI untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terbentuklah Badan Keahlian DPR RI yang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian. Sistem pendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran, yaitu unit eselon II yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keahlian.

Melalui pembentukan ini, dukungan keahlian di bidang anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Anggaran tidak hanya mencakup analisis dan referensi pada setiap siklus APBN, namun juga di luar siklus APBN melalui penerbitan buku, buletin APBN, Jurnal Budget, dan Analisis Ringkas Cepat (ARC) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pengganti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada tahun 2020 terdapat perubahan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dimana peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan Instansi Pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Setjen DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang persidangan, administrasi dan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat

Utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, keempat unit eselon I di bawah Setjen DPR RI saling bersinergi dalam memberikan dukungan kepada DPR RI.

B. Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kajian Anggaran

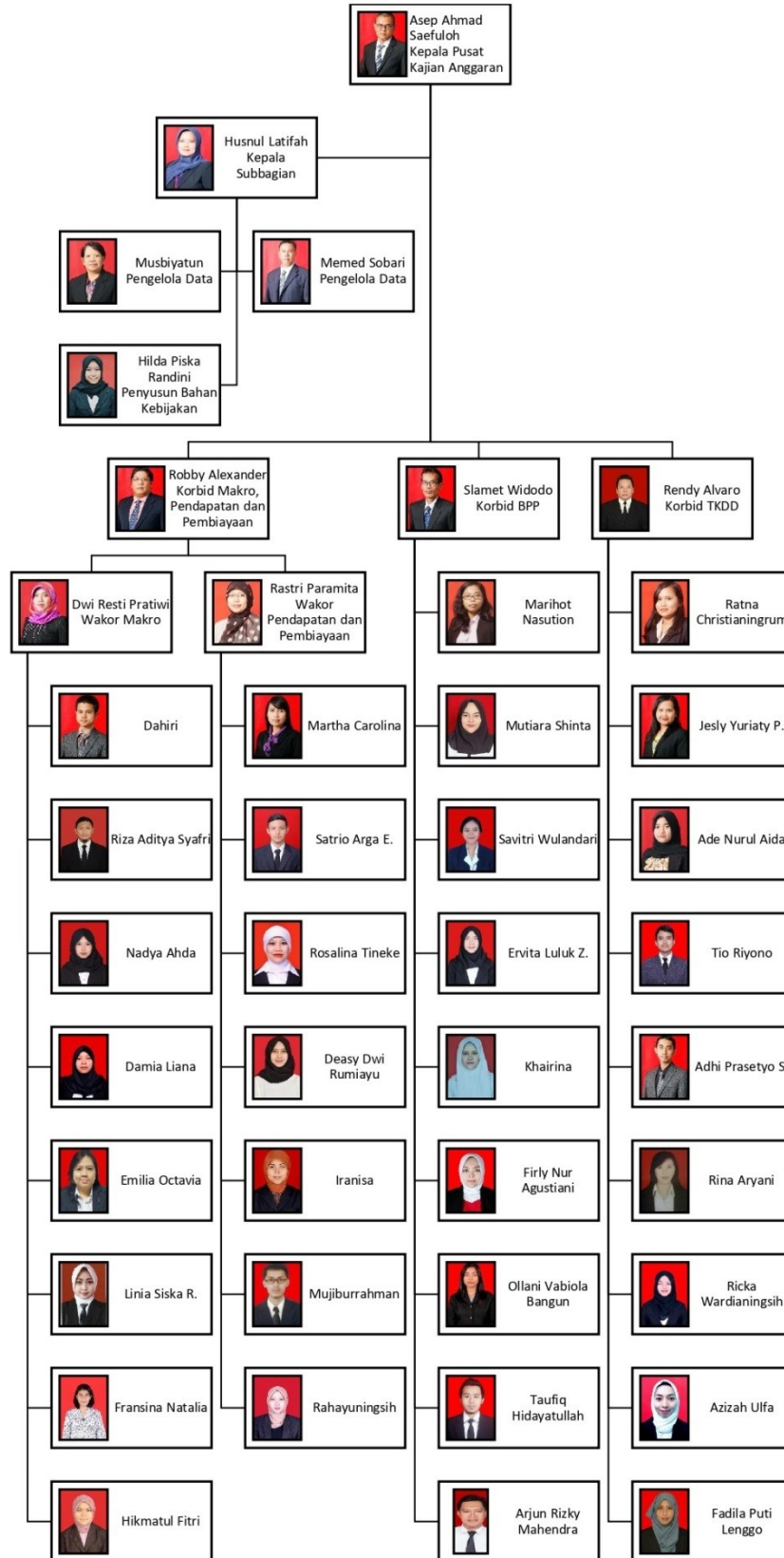
Pusat Kajian Anggaran secara resmi terbentuk setelah disahkannya Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal di atas, tugas Pusat Kajian Anggaran adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN, adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Tabel 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan utama yang dihadapi Pusat Kajian Anggaran antara lain:

1) Ketatalaksanaan

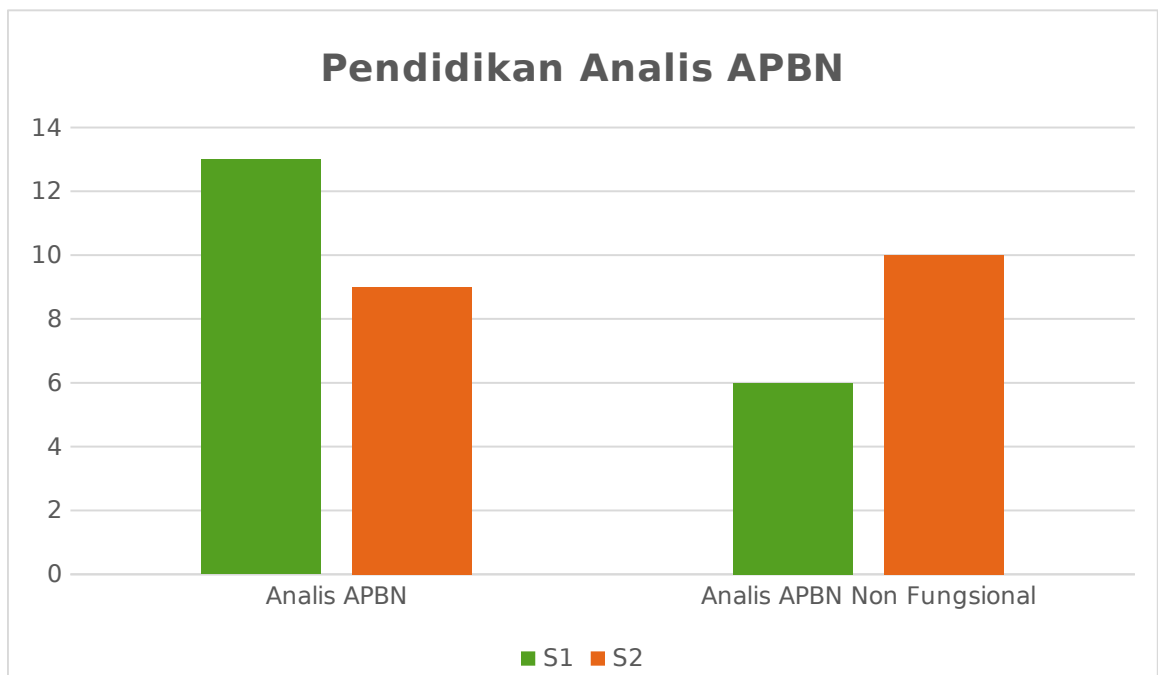
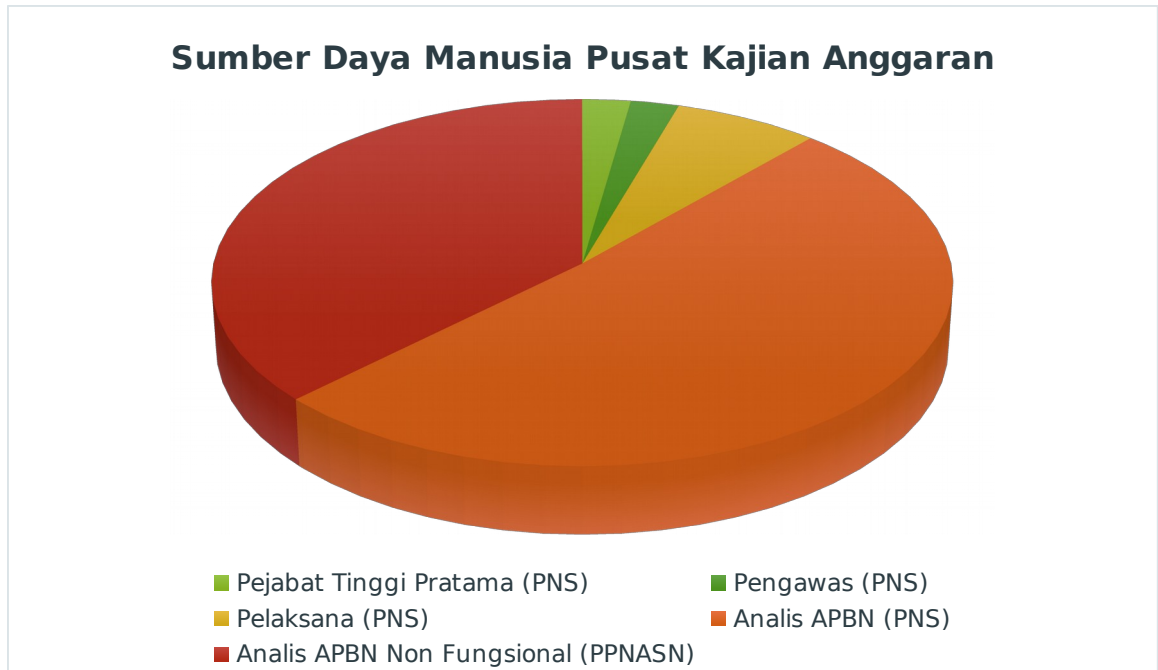
Dalam kondisi pandemi Covid-19, tata kerja di Pusat Kajian Anggaran mengalami penyesuaian yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor SJ/08572/SETJEN dan BK DPR RI/DA/07/2020 tentang Tata Kerja dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun penyesuaian yang dimaksud meliputi i:

1. Pembatasan berkegiatan di kantor bagi Pegawai yang rentan;
2. Kegiatan di kantor memperhatikan daya tampung ruang;
3. Bagi pegawai Work from Home (WFH) wajib mengaktifkan alat telekomunikasi;
4. Komunikasi kerja jarak jauh melalui video conference dengan aplikasi zoom;
5. Pegawai wajib mengisi laporan kesehatan dan catatan harian di Aplikasi Sirajin;
6. Wajib menggunakan masker;
7. Menggunakan face shield bagi pegawai yang berinteraksi dengan orang banyak;
8. Jaga jarak minimal 1 meter;
9. Pengukuran suhu tubuh;
10. Rajin mencuci tangan;
11. Tersedianya hand sanitizer dan cairan disinfektan di setiap ruangan;
12. Menghindari penggunaan peralatan secara bersama.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia Pusat Kajian Anggaran 43 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama 1 (satu) orang, Pengawas 1 (satu) orang, Pelaksana 3 (tiga) orang, Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang dan 16 (enam belas) orang Pegawai Analis APBN Non Fungsional/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara/PPNASN, adapun rincian jenis pegawai Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sumber Daya Manusia Pusat Kajian Anggaran



Dilihat dari jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Kajian Anggaran secara kuantitas belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan analisis APBN kepada Dewan sehingga harus ditambah. Saat ini jumlah Analis APBN sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, ini masih jauh dari jumlah ideal, dimana kebutuhan jumlah ideal Analis APBN setelah dihitung sesuai Analisa Beban Kerja adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang.

Tahun 2019 Pusat Kajian Anggaran menerima CPNS Analis APBN sebanyak 10 (sepuluh) orang, akan tetapi jika dilihat secara kuantitas jumlah Analis APBN masih kurang untuk itu diharapkan setiap tahun Pusat Kajian Anggaran mendapatkan CPNS Analis APBN, agar kinerja Pusat Kajian Anggaran optimal seharusnya Analis APBN seluruhnya diisi oleh Analis APBN, adapun jumlah Analis APBN yang existing 38 (tiga puluh delapan) orang, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Analis APBN 22 (dua puluh dua) orang
2. Analis APBN PPNASN 16 (enam belas) orang,

3) Anggaran Pusat Kajian Anggran Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Anggaran dan Pegawai

No	Keterangan	2019	2020
1	Anggaran	5.258.830.000	3.875.836.000
2	Pegawai	44	43

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 mengenai postur dan rincian APBN Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN), tahun 2020 Anggaran Pusat Kajian Anggaran mengalami pengurangan untuk mengatasi keadaan tersebut Pusat Kajian Anggaran melakukan revisi anggaran dan melakukan penyesuaian kegiatan.

4) Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien harus didukung oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. Parameter yang dapat digunakan antara lain, proporsi jumlah SDM yang ada dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, beban tugas, dan *output* yang dihasilkan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan saat ini antara lain komputer, *laptop* dan tinta *printer berwarna*, termasuk didalamnya pemenuhan data untuk kepentingan *database*.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Renstra Pusat Kajian Anggaran dan Perencanaan Kerja

Tahun 2020 merupakan tahun ke-enam bagi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI menjalankan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini Pusat Kajian Anggaran masih perlu melakukan pembenahan, karena di satu sisi harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan keahlian kepada DPR RI secara optimal tetapi di sisi lain harus terus menata kelembagaannya agar dapat mencapai visinya, **“Menjadi Organisasi Penyedia Referensi Kajian/Analisis APBN yang professional, modern dan terpercaya.”**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sebagai bagian dari proses pencapaian akuntabilitas kinerja maka Pusat Kajian Anggaran perlu menyusun rencana kerja sebagai panduan arah kebijakan, strategi, dan target yang akan dicapai tahun 2020 serta kebutuhan penganggarnya.

Rencana kerja disusun sebagai bagian dari proses kesinambungan perencanaan strategis Pusat Kajian Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Kajian Anggaran 2020-2024. Selanjutnya dalam Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran akan dijelaskan Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja.

Selanjutnya tema yang diangkat dalam rencana kerja Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020 adalah konsolidasi Produk Analisis APBN. Dukungan kajian anggaran yang dilakukan harus menghasilkan kajian-kajian APBN yang mampu memberikan rekomendasi bagi DPR RI dalam memperbaiki sisi alokasi, distribusi dan stabilisasi APBN. Selanjutnya DPR RI dapat memanfaatkan hasil-hasil analisis APBN tersebut dalam menjalankan fungsi anggarannya.

Output dari Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran untuk tahun 2020 adalah analisis/referensi/laporan APBN. Adapun indikator kinerja diukur melalui: Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan jumlah

analisis/referensi/laporan APBN, target kinerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Target Kinerja

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2020
Indikator Kinerja	Target
Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Rencana Kerja Tahunan	1
Rencana Kerja dan Anggaran	1
Laporan Kinerja	1
Dokumen Kebijakan Lainnya	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	18
Buku Terkait APBN	4
Analisis Disesuaikan Siklus	13
Referensi	4
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	41
Non Perjanjian Kinerja (PK)	
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5
Seminar Luar Kota	-
Laporan Pengembangan Profesi	2
Laporan Workshop	-
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	11
TOTAL DOKUMEN PKA	52

Adapun target dari masing-masing indikator tersebut adalah:

1. Target kinerja utama (*cascading*) dari Bahan Kebijakan ditetapkan sebanyak 4 (empat) laporan, yaitu; Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Kinerja dan Dokumen kebijakan Lainnya.

Target kinerja utama (*cascading*) dari Target Analisis/ Referensi/ Laporan APBN adalah sebanyak 41 (empat puluh satu) produk yang terdiri dari Jurnal, buletin APBN/ARC, Buku APBN, analisis, APBN, referensi, sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) ditetapkan 11 (sebelas) *output* yaitu

laporan pengumpulan data ke daerah, seminar luar kota dan laporan pengembangan profesi.

Untuk pencapaian target maka untuk tahun 2020 Pusat Kajian Anggaran menyusun Perencanaan Kerja (Renja) *output* per bulannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perencanaan Kerja *Output* Pusat Kajian Anggaran Tahun Anggaran 2020

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	2020	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus t	Sept	Okt	Nov	Des
Indikator Kinerja	Targe t	Targe t	Target	Targe t	Targ et	Targ et	Targ et	Targ et	Targ et	Targ et	Targe t	Targ et	Targ et
Satker Setjen													
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran													
Rencana Kerja Tahunan	1	1											
Rencana Kerja dan Anggaran	1	1											
Laporan Kinerja	1	1											
Dokumen Kebijakan Lainnya	1			1									
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	4											
Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)													
Indikator Kinerja	Targe t	Targe t											
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN													
Jurnal	2							1					1
Buletin APBN/ ARC	18		1	2	3	2	4	1	2	1	1	1	
Buku Terkait APBN	4									2		2	
Analisis Disesuaikan Siklus Referensi	13						4			9			
	4						2			2			
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	41												
Non Perjanjian Kinerja (PK)													
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5	2	1	2	1	2	1						
Seminar Luar Kota	-												
Laporan Pemodelan Ekonomi	-												
Laporan Pengembangan Profesi	2												
Laporan Workshop	-								1		2		
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	11												
TOTAL DOKUMEN PKA	52												

SOP Pusat Kajian Anggaran tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. SOP

NO	NAMA SOP
1	SOP Pemanggilan Pakar
2	SOP Penyusunan Analisis
3	SOP Penyusunan Referensi
4	SOP Penyusunan Analisis Ringkas Cepat/ARC
5	SOP Penerbitan Buletin APBN
6	SOP Penulisan Buku APBN
7	SOP Penerbitan Jurnal Budget
8	SOP Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri
9	SOP Pendampingan Ke Alat Kelengkapan Dewan
10	SOP Pendokumentasian Hasil Kerja
11	SOP Pengumpulan Data Dalam Kota/Pembelian Data
12	SOP Pengumpulan Data Ke Daerah
13	SOP Penyelenggaraan Workshop
14	SOP Rapat Internal
15	SOP Penggunaan Anggaran Jamuan
16	SOP Penggunaan Anggaran Narasumber
17	SOP Penggunaan Anggaran Pencetakan
18	SOP Penggunaan Anggaran SPPD
19	SOP Pertanggungjawaban Anggaran SPPD
20	SOP Surat Keluar
21	SOP Surat Masuk
22	SOP Usulan Anggaran

B. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan Perjanjian Kinerja Pusat Kajian Anggaran sebagai program strategis Pusat Kajian Anggaran akan direalisasikan pada akhir tahun 2020, adapun perjanjian kerja Pusat Kajian Anggaran dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7. Perjanjian Kinerja
Pusat Kajian Anggaran Tahun 2020**

No	Sasaran/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kajian penyusunan dan penetapan anggaran terkait pelaksanaan Anggaran DPR dalam dan anggaran dengan fungsi	1. Persentase analisis/referensi/laporan /tentang APBN yang dipublikasikan	100%
		2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat, buletin APBN)	2.75%
		3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran	90%
	Kegiatan	Anggaran	
	Penyusunan Kajian APBN	3.875.836.000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mendukung pelaksanaan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan, pada Tahun 2020 Pusat Kajian Anggaran menyusun berbagai rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran. Kegiatan Penyusunan Kajian Anggaran terbagi dalam dua sub kegiatan yaitu: Perumusan

Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran dan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2020 ditetapkan *output* utama Analisis sebanyak 41 *output*. Dalam pelaksanaannya telah dihasilkan 41 *output* Kajian sehingga pencapaian adalah 100 persen. Adapun *output* Penyusunan analisis/referensi/laporan APBN yang terdiri dari:

1. Buletin sebanyak 18:

Tabel 8. Buletin Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Buletin APBN Edisi 1, Februari 2020	Dibalik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Awal Tahun 2020
		Review PMN pada LPEI dalam Rangka Mendukung Program Ekspor Nasional
		Tantangan Kebijakan Belanja dalam Mempertahankan Single Digit Angka Kemiskinan
2	Buletin APBN Edisi 2, Maret 2020	Problematika BUMDes Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa
		Implementasi Mandat Penurunan Harga Gas Bumi Untuk Industri
		Tragedi Covid-19 Akan Menggoyang Pendapatan Negara 2020?
3	Buletin APBN Edisi 3, Maret 2020	Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Program Sembako Harus Lebih Efektif
		Dampak Omnibus Law
		Siapakah Indonesia Dijuluki "Negara Maju"?
4	Buletin APBN Edisi 4, April 2020	Stimulus Fiskal Jilid II dan Potensi Shortfall Pajak 2020
		Menyoroti Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia
		Dampak Keterlambatan Petunjuk Teknis K/L Terhadap Penyerapan DAK Fisik
5	Buletin APBN Edisi 5, April 2020	Revisi Regulasi Impor Limbah Non-B3 & Dampaknya Bagi Industri
		Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon
		Dibalik Tambahan Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
6	Buletin APBN Edisi 6, April 2020	Tantangan Penguatan Program BLT (Dana Desa) di Masa Pandemi Covid-19
		Perkembangan Proyek Jaringan Gas Kota
		Evaluasi Restitusi Pajak dan Tantangan Restitusi Pajak Dipercepat
7	Buletin APBN Edisi 7, Mei 2020	Perluakah Kartu Prakerja Saat Pandemi Covid-19?
		Tantangan & Kegiatan PKTD Saat Masa Pandemi
8	Buletin APBN	Kinerja Ekonomi Domestik Kuartal I 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
8	Buletin APBN	Penerimaan Negara Sektor Minyak Bumi di Tengah

	Edisi 8, Mei 2020	Anjloknya Harga Minyak Mentah Dunia & Pandemi Covid-19 Penyaluran KUR & Potensi Relaksasi KUR Saat Pandemi Covid-19 Menakar Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua
9	Buletin APBN Edisi 9, Juni 2020	Potensi Lonjakan Kemiskinan Indonesia Akibat Pandemi Covid-19 Menakar Potensi Risiko Pembiayaan Utang Pasca UU No. 2/2020 Ancaman Kerawanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19
10	Buletin APBN Edisi 10, Juni 2020	Dana Bagi Hasil 2020 Tekan Ruang Fiskal Daerah Analisis Strategi Menyelamatkan Industri Tekstil Dalam Negeri Potensi dan Tantangan PPN PMSE
11	Buletin APBN Edisi 11, Juni 2020	Polemik Kenaikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi Menilik Kemandirian Fiskal Daerah Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Urgensi dan Tantangannya
12	Buletin APBN Edisi 12, Juni 2020	Review Kebijakan Reformasi Perpajakan, Kini dan Nanti Overview “New Normal” Kebijakan Belanja Negara melalui Zero Based Budgeting BOP Pendidikan Kesetaraan dan Tantangannya
13	Buletin APBN Edisi 13, Juli 2020	Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19 Dana Investasi Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tantangan Reformasi Subsidi Listrik Menjadi Bansos
14	Buletin APBN Edisi 14, Agustus 2020	Dana BOK Tambahan dan Potensi Masalah yang Perlu Diwaspadai Pemerintah Sektor Pertanian: Berperan Besar, Realisasi Investasi Belum Optimal Menakar Permasalahan Insentif Pajak Dunia Usaha
15	Buletin APBN Edisi 15 Agustus 2020	Urgensi dan Tantangan Program Organisasi Penggerak Tantangan Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Outlook Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia 2021
16	Buletin APBN Edisi 16, September 2020	Upaya Optimalisasi Potensi Pajak Shadow Economy Tantangan Program Food Estate dalam Menjaga Ketahanan Pangan Upaya Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Melalui Dana PK2UKM
17	Buletin APBN Edisi 17 Oktober 2020	Menelisis Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat Penataan Sistem Logistik melalui National Logistic Ecosystem (NLE) dan Potensi Penerimaan Kepabebean BPUM: Program Baru Bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19
18	Buletin APBN Edisi 18 November 2020	Tantangan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Melalui Penggunaan Dana Pelayanan Ketahanan Pangan & Pertanian (DPKPP)

	Perkembangan Kinerja Foreign Direct Investment (FDI) dan Hambatannya
	Menakar Penerimaan dan Kebijakan Pajak 2021 di Tengah Ancaman Resesi

2. Analisis dan infografis sebanyak 13:

Tabel 9. Analisis Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Analisis dan Infografis No.01/an.PKA/PP/VI/2020	Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBPN 2021: "Optimisme Penguatan Fundamental Ekonomi di Tengah Ketidakpastian
2	Analisis dan Infografis No.02.PKA/PP/VI/2020	Evaluasi Penyertaan Modal Negara Kepada BUMN Periode 2015 - 2019
3	Analisis dan Infografis No.03/an.PKA/PP/VI/2020	Kinerja Belanja Pegawai, Barang dan Modal dalam APBN Periode 2015 - 2019
4	Analisis dan Infografis No.04/an.PKA/PP/VI/2020	Menakar Peran Dana Desa dalam Menekan Kemiskinan Desa
5	Analisis dan Infografis No.05/an.PKA/APBN/IX/2020	Outlook Penerimaan Perpajakan dan PNBPN 2021
6	Analisis dan Infografis No.06/an.PKA/APBN/IX/2020	Harga Minyak dan Komoditas Unggulan Indonesia: Perkembangan dan Determinannya
7	Analisis dan Infografis No.07/an.PKA/APBN/IX/2020	Prospek Perekonomian Indonesia dan Catatan Kritis RAPBN 2021
8	Analisis dan Infografis No.08/an.PKA/APBN/IX/2020	Evaluasi Indikator Sasaran Pembangunan dalam UU APBN
9	Analisis APBN dan Infografis No.09/an.PKA/APBN/IX/2020	Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Tantangan BLU Tahun 2021
10	Analisis APBN dan Infografis No.10/an.PKA/APBN/IX/2020	Ketenagakerjaan Indonesia: Menghadapi Pandemi, Menjelang Bonus Demografi
11	Analisis APBN dan Infografis No.11/an.PKA/APBN/IX/2020	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
12	Analisis APBN dan Infografis No.12/an.PKA/APBN/IX/2020	Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pembiayaan Kreatif
13	Analisis APBN dan Infografis No.13/an.PKA/APBN/IX/2020	Penguatan Transfer ke Daerah bagi Kemudahan Berusaha di Daerah

3. Buku sebanyak 4:

Tabel 10. Buku Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Buku	Bunga Rampai Isu-Isu Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan Dalam Mewujudkan SDM Unggul
2	Buku	Dana Transfer Khusus Dalam APBN Edisi I Tahun 2020
3	Buku	Bunga Rampai Dinamika Isu-isu Perpajakan di Indonesia
4	Buku	Tinjauan Kritis Atas Kinerja Sektor Pertanian, Perikanan dan Industri Pengolahan

4. Referensi sebanyak 4:

Tabel 11. Referensi Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Referensi 01/ref.PKA/APBN/VI/ 2020	Alokasi Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN Berdasarkan Tujuan Pemberian Melalui APBN (Periode 2015 - 2020)
2	Referensi 02/ref.PKA/APBN/VI/ 2020	Perkembangan Indeks Daya Saing Global Indonesia
3	Referensi 03/ref.PKA/APBN/IX/ 2020	Dari APBN untuk Desa
4	Referensi 04/ref.PKA/APBN/IX/ 2020	Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis, dan Organisasi Tahun 2018 - 2021

5. Jurnal sebanyak 2:

Tabel 12. Jurnal Tahun 2020

NO	JENIS PRODUK	JUDUL
1	Jurnal Volume 5 Edisi 1 (Juli 2020)	<ul style="list-style-type: none">Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di IndonesiaPengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang

		<p>Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020 pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN • Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah • Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak • Evaluasi Dana Desa Dilihat dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun • Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018 • Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia
2	Jurnal Volume 5 Edisi 2 (Desember 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial) Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2019 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Inti Di Indonesia • Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah • Analisis Daya Saing Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di Pasar ASEAN • Optimalisasi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara Sektor Perbankan sebagai Upaya Meningkatkan PNBPNBP • Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia • Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia • Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Investasi di Indonesia • Analisis Kritis terhadap Kinerja Sektor Pertanian Subsektor Tanaman Pangan • Menyelisik Shadow Economy di Indonesia

6. Sementara untuk target kinerja tambahan (*noncascading*) berupa penyelenggaraan *database* pengumpulan data lapangan ke daerah semula dijadwalkan 9 (sembilan) kegiatan akan tetapi dengan adanya pandemic Covid-19 hanya dilakukan 5 (lima) kegiatan/laporan sedangkan untuk kegiatan seminar tidak dilakukan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 13:

Tabel 13. Laporan Pengumpulan Data Tahun 2020

NO	KEGIATAN
1	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY
2	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
3	Laporan Pengumpulan Data Ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
4	Laporan Pengumpulan Data Ke Kabupaten Sleman Provinsi DIY

7. Dalam kategori analisis juga dihasilkan Analisa Ringkas Cepat (ARC) yaitu analisis yang sifatnya pendek dan membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat, produk ini dibuat didasarkan pada permintaan. Jumlah Analisis Ringkas Cepat (ARC) selama tahun 2020 dihasilkan sebanyak 16 (enam belas) analisis dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Analisis Ringkas Cepat (ARC) Tahun 2020

NO	Analisis Ringkas Cepat (ARC)	AKD
1	Analisis Ringkas Cepat tentang Permasalahan <i>Saving Plan Bancassurance</i> Jiwasraya	Komisi VI
2	Analisis Ringkas Cepat tentang Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat	Banggar
3	Analisis Ringkas Cepat tentang Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal	Banggar
4	Analisis Ringkas Cepat tentang Belanja Pendidikan Indonesia	Banggar
5	Analisis Ringkas Cepat tentang Anggaran Pertahanan Indonesia: Pemenuhan Minimum Essential Force	Banggar
6	Analisis Ringkas Cepat tentang Tantangan & Perkembangan Kebijakan Anggaran Subsidi Pupuk	Banggar
7	Analisis Ringkas Cepat tentang Pengelolaan & Kebijakan Subsidi Solar Demi Terciptanya Subsidi Solar Tepat Sasaran	Banggar
8	Analisis Ringkas Cepat tentang Subsidi Gas LPG Tabung 3 Kg	Banggar
9	Analisis Ringkas Cepat tentang Sebaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Banggar
10	Analisis Ringkas Cepat tentang Efektivitas Dana Desa	Banggar
11	Analisis Ringkas Cepat tentang Look Out 2020: Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Banggar
12	Analisis Ringkas Cepat tentang Outlook Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2021	Banggar
13	Analisis Ringkas Cepat tentang Kajian Terhadap Kinerja Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia	Banggar
14	Analisis Ringkas Cepat tentang Lookout Pendapatan Negara 2020	Banggar
15	Analisis Ringkas Cepat tentang Pengembangan EBT: Capaian dan Dampaknya terhadap Ekonomi dan Lingkungan	Banggar
16	Analisis Ringkas Cepat tentang Lookout Asumsi Makroekonomi	Banggar

Untuk Pengembangan Instrumen Profesi Analis APBN Tahun 2020 telah disusun 2 (dua) rancangan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, yaitu :

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
2. 2. Persekjen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis APBN melalui Perpindahan dari Jabatan lain.

Terkait target dan realisasi kinerja tahun 2020, berikut disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dan realisasi kinerja tahun 2020, Renstra 2020 - 2024 dengan realisasi 2020, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau meningkat/menurunnya serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan juga analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 15 :

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Target 2020	Realisasi 2020
Indikator Kinerja		
Satker Setjen		
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Rencana Kerja Tahunan	1	1
Rencana kerja dan Anggaran	1	1
Laporan Kinerja	1	1
Dokumen Kebijakan Lainnya	1	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
Jurnal	2	2
Buletin APBN/ ARC	18	18
Buku Terkait APBN	4	4
Analisis Disesuaikan Siklus	13	13
Referensi	4	4
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	41	41
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5	5
Seminar Luar Kota	-	-
Laporan Pengembangan Profesi	2	2
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	11	7
TOTAL DOKUMEN PKA	52	52

Target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2020 terkait meningkatnya kualitas analisis/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI tercapai 100 % , indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat, buletin APBN target 2,75% dan tercapai 3.20% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran target 90% dan tercapai 98,87 % jika dilihat target yang dicapai melebihi yang ditargetkan hal tersebut dikarenakan Pusat Kajian Anggaran selalu melakukan evaluasi kegiatan.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan Realisasi 2020

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2019	Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi 2020
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	
Satker Setjen		Satker Setjen	
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Perjanjian Kinerja (PK) 3 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		Perjanjian Kinerja (PK) 4 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
Renstra 2016-2019	1	Rencana Kerja Tahunan	1
Renja	1	Rencana Kerja dan Anggaran	1
LAKIP/Laporan Tahunan	1	Laporan Kinerja	1
		Dokumen Kebijakan Lainnya	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	3	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	
Jurnal	2	Jurnal	2
Buletin APBN/ ARC	24	Buletin APBN/ ARC	18
Buku Terkait APBN	5	Buku Terkait APBN	4
Analisis Disesuaikan Siklus	14	Analisis Disesuaikan Siklus	13
Referensi	5	Referensi	4
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 41 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	41
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	14	Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5
Laporan Pemodelan Ekonomi	-	Laporan Pemodelan Ekonomi	-
Laporan Pengembangan Profesi	-	Laporan Pengembangan Profesi	2
Laporan Workshop	3	Laporan Workshop	-
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	17	Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	7
TOTAL DOKUMEN PKA	72		52

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perbedaan target perjanjian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020, akan tetapi target dapat dicapai 100 %. target Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Kajian Anggaran tahun 2020 terkait meningkatnya kualitas analisis/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI tercapai 100% , sedangkan indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat, buletin APBN target 2,75%

dan tercapai 3.20% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran target 90% dan tercapai 98,87 % jika dilihat target yang dicapai sudah melebihi yang ditargetkan hal tersebut dikarenakan Pusat Kajian Anggaran selalu melakukan evaluasi kegiatan.

Tabel 17. Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi Kinerja 2020

Target dalam Perjanjian Kinerja (PK)	RENSTRA 2020-2024	Realisasi 2020
Indikator Kinerja		
Satker Setjen		
051. Perumusan Bahan Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Perjanjian Kinerja (PK) 3 Kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
Rencana Kerja Tahunan	1	1
Rencana Kerja dan Anggaran	1	1
Laporan Kinerja	1	1
Dokumen kebijakan Lainnya	1	1
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK)	4	4
052. Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN		
Jurnal	2	2
Buletin APBN/ ARC	24	18
Buku Terkait APBN	5	4
Analisis Disesuaikan Siklus	14	13
Referensi	5	4
Jumlah Perjanjian Kinerja (PK) 50 Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	41
Laporan Pengumpulan Data Ke Daerah*	5	5
Laporan Pemodelan Ekonomi	1	-
Laporan Pengembangan Profesi	4	2
Jumlah Non Perjanjian Kinerja (PK)	10	7
TOTAL DOKUMEN PKA	64	52

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran selama tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp3.875.836.000 yang terdiri dari: Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan sebesar Rp1.924.770.000 dan anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN sebesar Rp1.951.066.000 Adapun realisasinya adalah sebesar Rp3.832.120.200 atau mencapai 98,87 persen rincian lebih lanjut dijelaskan pada sub-sub bagian berikut.

a. Realisasi Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan

Anggaran kegiatan Perumusan Kebijakan dialokasikan sebesar Rp1.924.770.000 tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp1.916.091.000.

b. Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN

Anggaran kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Analisis/Referensi/Laporan APBN dialokasikan sebesar Rp1.951.066.000 tetapi dalam pelaksanaannya yang terealisasi sebesar Rp1.916.029.200.

Tabel 18. Perbandingan Penyerapan DIPA TA. 2019 dan 2020

Keterangan	TA 2019	TA 2020
DIPA	Rp5.258.830.000	Rp3.875.836.000
Penyerapan	Rp5.224.745.550	Rp3.832.120.200
%	99,35 persen	98,87 persen

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat perbedaan penyerapan Tahun 2019 dan Tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya sisa honorarium tim Analisis yang terkena matrikulasi sehingga dalam kegiatan terdapat sisa hitungan anggaran.

Tahun 2020 target Pusat Kajian Anggaran dari indikator kinerja melebihi hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan selalu dilakukan evaluasi, dan capaian sasaran/kegiatan dan realisasi tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Sasaran/kegiatan dan Realisasi

Sasaran/kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1. Meningkatkan kualitas kajian dalam penyusunan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%
	2. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas terbitan (buku, jurnal ilmiah, info singkat, bulletin APBN)	2,75	3,20

RI	3. Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran	90%	98,87%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada aspek sumber daya manusia tahun 2021 Pusat Kajian Anggaran membutuhkan 47 (empat puluh tujuh) Analis APBN yang dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja. Dengan penambahan tersebut diharapkan pelayanan di bidang anggaran kepada Anggota Dewan dapat lebih maksimal, jumlah tersebut akan lebih ideal kalau tercukupi dengan Pegawai Negeri Sipil.
2. Sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19 Anggaran Pusat Kajian Anggaran mengalami pengurangan anggaran sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 mengenai postur dan rincian APBN Tahun 2020.
3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pada aspek sarana dan prasarana kerja, permasalahan mendasar adalah kurangnya sarana kerja seperti komputer/laptop, printer, tinta printer berwarna termasuk didalamnya pemenuhan akses data untuk kepentingan *database*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya dukungan dari Kepala Badan Keahlian Dewan dan Sekjen DPR RI dalam hal Penambahan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI dalam hal penambahan anggaran;
3. Diharapkan adanya dukungan dari Sekjen DPR RI sarana kerja seperti komputer/laptop, printer dan tinta printer berwarna, selain itu diperlukan juga akses data untuk keperluan Analis APBN.
4. Untuk meningkatkan Kompetensi Analis APBN, perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan ToT dan ToF, Ekonometri dan Keuangan Negara, Penyusunan Infografis atau Design grafis, Pelatihan *Regulatory Impact Assessment, Government Spending Analysis, Performance Based Budgeting and Budget Planning, Public Expenditure Review*, Pelatihan

Struktural Equation Model (SEM), Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Populer.

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Anggaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Indra Iskandar, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keahlian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 02 Januari 2020
Pihak Pertama,

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 19710911 199703 1 005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya dukungan dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1. Persentase Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN yang dipublikasikan	100 %
		2. Rencana Kerja Tahunan	1 dokumen
		3. Rencana Kerja dan Anggaran	1 dokumen
		4. Laporan Kinerja	1 dokumen
		5. Dokumen Kebijakan Lainnya	1 dokumen

Program	Anggaran
Kegiatan: Penyusunan Kajian APBN	Rp3.875.836.000,-

Pjt. Kepala Badan Keahlian,

Jakarta, 02 Januari 2020
Kepala Pusat Kajian Anggaran,


Ir. Indra Iskandar, M.Si
NIP. 19661114 199703 1 001


Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 19710911 199703 1 005